

## **Pengaruh Penyelenggaraan Haji terhadap Peningkatan Aktivitas Ekonomi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**

**Oleh : Chairul Akmal.**

(Kementerian Agama Republik Indonesia)

### **ABSTRACT**

*This research analyzes some factors affecting economic activities in relation with the conduct of pilgrimage. Those factors are the pilgrimage cost, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers. The objective of this research is to acquire the information of how each factor and all factors together affect the economic activities. This research also analyzes the effect of foods and drinks expenses, the effect of non-foods and drinks expenses, and the effect of miscellaneous expenses on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' economic activities.*

*This research is conducted in DKI Jakarta in 2007. The population of this research is the average economic activities in DKI Jakarta in 2007. There are 42 respondents (Banks), 157 respondents (travel agencies), and 50 respondents (UMKM – Micro, Small, Medium enterprises) which are taken as samples from the population using the purposive sampling method. The data is obtained by the researcher using questioners and secondary data which is taken from 1990-2007.*

*The methodology used in this research is based on the causal relationship model. In testing the hypothesis of this research, the researcher uses the simple and multiple regression methods, and path analysis method. The significant rate  $\alpha = 0,05$  used in determining the interpretation of the statistic result. The data is processed using SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) version 12.00.*

*The results of the analysis :*

*In the 1<sup>st</sup> equation are (i) the effect of the pilgrimage cost on banks' revenues is quite strong, (ii) the effect of the pilgrimage cost on travel agencies' revenues is quite strong, (iii) the effect of the pilgrimage cost on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak.*

*In the 2<sup>nd</sup> equation are (i) the effect of the amount of pilgrims on Banks' revenues is very weak, (ii) the effect of the amount of pilgrims on travel agencies' revenues is very weak, (iii) the effect of the amount of pilgrims on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is very weak.*

*In the 3<sup>rd</sup> equation are (i) the effect of the amount of pilgrimage officers on banks' revenues is very weak, (ii) the effect of the amount of pilgrimage officers on travel agencies' revenues is very weak, (iii) the effect of the amount of pilgrimage officers on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is very weak.*

*In the 4<sup>th</sup> equation are (i) the effect of all three factors which are the pilgrimage cost, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on banks' revenues is very strong, (ii) The effect of all three factors which are pilgrimage costs, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on travel agencies' revenues is strong, (iii) The effect of all three factors which are pilgrimage costs, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is strong.*

*In the 5<sup>th</sup> equation is the effect of foods and drinks expenses on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak. In the 6<sup>th</sup> equation, the effect of non-foods and drinks expenses on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak. In the 7<sup>th</sup> equation, the effect of miscellaneous expenses on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is quite strong. In the 8<sup>th</sup> equation, the effect of all three factors which are the effect of foods and drinks expenses, the effect of non-foods and drinks expenses, and the effect of miscellaneous expenses simultaneously on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is quite strong.*

*The implication of the research results mentioned above is the factors in the conduct of pilgrimage do increase the economic activities (Banks, Travel Agencies, and UMKM – Micro, Small, Medium enterprises) in DKI Jakarta. Therefore, considering that matter, the General Director of the conduct of pilgrimage division of Department of Religion Republic of Indonesia should determine the pilgrimage cost which is affordable, increase the service, and provide a good information system which will result in a better conduct of the pilgrimage.*

## PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi banyak kritik dilontarkan terhadap penyelenggaraan ibadah haji karena adanya inefisiensi dan monopoli khususnya berkaitan dengan tingginya tarif angkutan haji melalui penerbangan udara. Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998, pemerintah menghapus monopoli dengan mengizinkan penerbangan lainnya selain perusahaan Garuda Indonesia. Kebijakan swastanisasi penyelenggaraan haji ini mengundang swasta untuk berpartisipasi dalam lingkup yang luas. Bahkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penekanan difokuskan pada pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji serta mengarah kepada sistem yang lebih profesional. Berbagai upaya untuk peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan melakukan perbaikan sistem dan manajemen, metode pengawasan dan memperluas hubungan kerja dengan instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penetapan perusahaan penerbangan sebagai pelaksana transportasi haji dilakukan oleh Menteri Agama dengan sistem penunjukkan langsung melalui proses penetapan spesifikasi angkutan haji, penawaran terbatas dan negosiasi. Dalam operasionalnya penerbangan haji dilakukan dengan sistem *charter*, sehingga tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif penerbangan reguler dengan rute yang sama.

Berdasarkan data sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 jumlah jamaah haji di Indonesia terus meningkat yakni pada tahun 1990 hanya 81.244 orang hingga tahun 1998 sebanyak 200.094. Tetapi sejak tahun 1999 pernah mengalami penurunan karena krisis ekonomi hanya 70.691. Kemudian meningkat kembali tahun 2000 hingga tahun 2007 pada kisaran 200.000 jamaah. Sedangkan jumlah jamaah haji DKI Jakarta meningkat pada periode 1990-1995 dari 6.777 orang menjadi 37.116 orang atau meningkat 547 %. Akan tetapi sejak tahun 1996 menjelang krisis ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang berarti yaitu hanya 5.569 orang saja. Sejak krisis ekonomi walaupun terus mengalami peningkatan jumlah jamaah haji DKI Jakarta berfluktuasi dalam kisaran 11.000 hingga 17.000 orang. Penurunan jamaah haji ini salah satu faktor adalah semakin mahalnya Ongkos Naih Haji (ONH) yang terus meningkat sejak tahun

1998 sehingga jumlah jamaah haji sejak tahun 2004 mengalami penurunan yakni dari 14.663 orang menjadi 7.051 orang pada tahun 2007 atau turun 52 %.

Ongkos Naik Haji (ONH) pada periode 1990-2007 juga terus semakin mahal seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Jika tahun 1990 ONH hanya Rp. 5.320.000,- maka pada tahun 2007 meningkat sebesar 550 %. Dalam upaya pelayanan jamaah haji telah dilakukan langkah-langkah efisiensi dengan mengurangi jumlah petugas pelayanan haji terutama sejak tahun 1995 yakni dari 332 orang petugas haji terus dikurangi hingga 120 orang pada tahun 2007. Kondisi ini terkait sebagai upaya untuk menekan ONH yang lebih murah dan lebih terjangkau.

Dengan perubahan jumlah jamaah haji tersebut diatas aktivitas penyelenggaraan haji berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya meliputi kegiatan transaksi melalui lalu lintas uang di lembaga jasa perbankan, *money changer*, perusahaan biro perjalanan (*travel bureau*), jasa pengangkutan barang, jasa pelayanan kesehatan serta para penaja usaha kecil yang berkaitan dengan aktivitas haji dimana mereka berada. Lebih jauh lagi penyelenggaraan haji membawa implikasi pada aktivitas usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan kebutuhan modal usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan laba usaha berbagai sektor usaha terkait yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan.

Peranan sektor perbankan dalam mendukung aktivitas haji, para jamaah haji menyetor dana untuk ONH sebelum keberangkatan sampai berangkat naik haji ke tempat tujuan menghimpun dana yang besar. Dengan jumlah haji sekitar 200.000 jamaah dan ONH sekitar Rp. 30 juta per orang, berarti perputaran dana di sektor perbankan (bank pemerintah dan swasta) mencapai sekitar Rp 6 triliun. Di DKI Jakarta dengan jumlah jamaah 7.000 orang perputaran dana haji di 10 bank di wilayah DKI Jakarta berkisar Rp. 210 milyar rupiah. Peranan biro perjalanan terkait dengan ibadah haji menerima pesanan tiket dan pelayanan sejak berangkat hingga kembali ke tanah air melibatkan dana 45 % dari ONH di Indonesia atau sekitar Rp. 2,7 triliun dan di wilayah DKI Jakarta sekitar melibatkan perputaran dana sekitar Rp. 94,5 milyar yang dijalankan oleh sebanyak 1.525 biro perjalanan.

Selain jasa angkutan udara, aktivitas transportasi darat (termasuk kereta api) dan laut tetap diperlukan oleh jamaah haji yaitu untuk mendukung perjalanan dari tempat asal menuju tempat embarkasi, atau sebaliknya dari lokasi embarkasi (pada saat pulang haji) ke tempat asal jamaah. Aktivitas ekonomi lainnya adalah jasa tata boga (*catering*) selama jamaah di karantina di Asrama Haji, selama perjalanan pergi dan pulang maupun selama berada di Arab Saudi ketika melaksanakan ibadah haji. Selama di karantina jamaah haji meskipun mendapat fasilitas makan dan minum juga mengeluarkan pengeluaran lainnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, beserta kebutuhan lain-lain di sekitar asrama haji yaitu para pedagang dan para usaha kecil. Oleh karena itu aktivitas ini juga berpengaruh terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar daerah pemondokan/karantina Asrama Haji. Menurut data BPS jumlah industri kecil di DKI Jakarta berkisar 2,8 juta sampai 3,0 juta unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah dan sektor dengan menyerap jutaan tenaga kerja.

### **Perumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah maupun pembatasan masalah tersebut, dengan demikian perumusan masalah penelitian adalah : Bagaimana pengaruh penyelenggaraan haji terhadap aktivitas ekonomi di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?

Rincian dari perumusan masalah penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji, jumlah petugas haji, biaya kebutuhan makanan minuman dan non makanan lainnya dalam penyelenggaraan haji terhadap aktivitas ekonomi di sektor perbankan, biro perjalanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji, jumlah petugas haji, biaya kebutuhan makanan minuman dan non makanan lainnya dalam penyelenggaraan haji terhadap aktivitas ekonomi di sektor perbankan, biro perjalanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?

### **BAHAN DAN METODE**

Salah satu teori motivasi dalam hal kebutuhan menurut A.H. Maslow antara lain

kebutuhan akan penghargaan atau kebutuhan egoistik untuk penghargaan diri, maupun penghargaan dari pihak lain. Kebutuhan akan penghargaan diri, mencakup kebutuhan untuk mencapai kepercayaan diri, prestasi, kompetensi, pengetahuan, penghargaan diri dan kebebasan serta independensi (ketidakketergantungan). Kelompok kedua kebutuhan akan penghargaan mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan reputasi seseorang individu, atau penghargaan diri dari pihak dari pihak lain, kebutuhan akan status, pengakuan, apresiasi terhadap dirinya dan respek yang diberikan oleh pihak lain. (Winardi, 2002, h. 15).

Disamping itu, kebutuhan lain menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi atau realisasi diri (*Self-Actualization Needs*). Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan-kebutuhan individu untuk merealisasi potensi yang ada pada dirinya, untuk mencapai pengembangan diri secara berkelanjutan, untuk menjadi kreatif, dalam arti kata seluas-luasnya. Kebutuhan yang berhubungan dengan aktualisasi penyaluran diri dalam arti kemampuan/minat/potensi diri dalam bentuk nyata dalam kehidupannya merupakan kebutuhan tingkat tinggi dari teori Maslow.

Ali Shariati dalam Nidjam dan Hanan (2003, h. 2), menyatakan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan konseptual, maka rukun-rukun Islam yang terpenting yang memberikan motivasi kepada *nation* muslim dan yang membuat warga-warganya sadar, merdeka, terhormat serta memiliki tanggung jawab sosial adalah tauhid, jihad dan haji.

Menurut Saleh Hassan, (2000, h. 1990), haji berarti : ziarah, atau sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Serupa dengan haji adalah umrah, yang juga berarti : berkunjung, atau beribadah ke Baitullah.

Perbedaan antara haji dan umrah adalah sebagai berikut :

- 1) Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan *Dzulhijah*, yaitu antara tanggal 8 hingga 13, sedangkan ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja;
- 2) Tempat melakukan ibadah haji adalah di Masjidil Haram Makkah, untuk melakukan *thawaf* dan *sa'i*, di Arafah untuk melakukan *wukuf*, dan di Mina untuk melempar *jumrah*, sedangkan tempat melakukan ibadah umrah hanya di Masjidil Haram Makkah untuk melakukan *thawaf* dan *sa'i*.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji 1999 (1999, h. 5), ibadah haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

### **Organisasi dan Sistem Manajemen Haji**

Manajemen haji mempunyai karakteristik yang spesifik dengan memadukan unsur pelayanan umum, pelayanan kesehatan, pelayanan ibadah dan keterkaitannya dengan lingkungan eksternal yang terus berkembang dan berubah termasuk didalamnya kebijakan negara yang lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keberagaman pemahaman dan pengetahuan ilmu keagamaan yang berkembang di masyarakat menambah kekhususan dalam pengelolaan perhajian mengingat hal ini sangat berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat bahwa apa yang dilakukan adalah yang benar, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diberikan keleluasaan namun tidak mengganggu terhadap keyakinan jamaah lainnya. Penyelenggaraan haji juga melibatkan berbagai instansi terkait yang dikoordinasikan oleh dan dibawah tanggungjawab Departemen Agama. Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antar negara, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam berbagai aspek perhajian, antara lain yang menyangkut pemberian visa, transportasi penerbangan antar negara dan pengangkutan antar kota perhajian, pemondokan di Arab Saudi, pelayanan kesehatan dan perizinan lainnya sangat menentukan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia.

Sindroma yang dialami pemerintah akibat kegagalan-kegagalan yang disebabkan karena penyalahgunaan kesempatan yang diberikan kepada penyelenggara haji swasta dalam penyelenggaraan haji, menyebabkan

pemerintah menetapkan penyelenggaraan haji sebagai tugas nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Setelah mengalami berbagai penyempurnaan peraturan perundangan yang mengatur kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan haji, kedudukan ini semakin dikuatkan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang berlaku sejak tanggal diundangkan, 3 Mei 1999. Secara yuridis formal undang-undang tersebut menjadi landasan hukum penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang ditetapkan sebagai sebuah tugas nasional berdasarkan pada asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian hukum. Pemerintah sebagai organisasi birokrasi penyelenggara negara mempunyai kekuasaan tunggal untuk menyelenggarakan pelaksanaan haji melalui departemen yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang agama.

Dengan undang-undang ini maka penyelenggaraan haji telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban pemerintah sebagai aparat *public service* dan jamaah haji sebagai *customer*. Disamping itu, semangat transparansi, profesionalisme dan pelayanan yang prima sangat mewarnai substansi yang terkandung dalam undang-undang ini, yaitu melibatkan peran serta masyarakat, penetapan biaya penyelenggaraan haji dilakukan dengan mendapat persetujuan DPR, perlindungan kepada jamaah haji dengan adanya sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang merugikan jamaah dan penghapusan monopoli.

### **Organisasi dan Penyelenggara Haji**

Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dengan dua teknis yaitu Direktorat Pembinaan Haji dan Direktorat Pelayanan Haji sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan haji untuk tingkat pusat mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas pokok departemen

di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji serta menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bimbingan masyarakat, penyelenggaraan dan pelayanan haji dan umrah.

Organisasi terkecil dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah kelompok terbang "kloter", yaitu sekelompok jamaah haji yang jumlahnya sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan. Dalam setiap kloter ditunjuk petugas operasional yang menyertai jamaah haji sejak di asrama haji, di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air yang terdiri dari unsur pemandu haji (TPIHI) yang juga berfungsi sebagai ketua kelompok terbang, pembimbing ibadah (TPIH), kesehatan (TKHI), ketua rombongan yang membawahi 4 (empat) regu dan ketua regu yang membawahi sepuluh s/d dua belas orang jamaah haji.

Prinsip dasar pengelompokan dalam organisasi kloter adalah dengan memperhatikan status mahrom hubungan keluarga, rombongan, kelompok bimbingan, domisili/wilayah tempat tinggal dan jenis pelayanan yang dipilih oleh jamaah haji.

Pada masa operasional haji, meliputi masa pemberangkatan jamaah haji dari asrama Embarkasi ke Arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah dan kedatangannya di Embarkasi asal, dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berfungsi sebagai pelaksana operasional yang melibatkan instansi terkait terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi. Pengendalian penyelenggaraan haji di tanah air dan di Arab Saudi dilakukan oleh Menteri Agama sedangkan teknis pengendalian operasional haji dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat Pusat, sedangkan pelaksana operasional sesuai dengan ruang lingkup daerah tugasnya.

Dalam masa operasional, pelayanan kepada jamaah haji dilakukan oleh petugas yang ditunjuk pemerintah terdiri dari :

*Pertama*, petugas yang tidak menyertai jamaah haji meliputi petugas di tanah air, petugas yang masuk dalam struktur dalam PPIH dan direkrut dari pegawai negeri sipil di lingkungan Depag, unit lain yang terkait dan tenaga musiman, petugas di Arab Saudi, petugas yang berasal dari unsur Bidang Urusan Haji Jeddah dan tenaga musiman baik mahasiswa Indonesia di Timur Tengah maupun mukimin di Arab

Saudi, dan petugas non kloter yang direkrut dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Depag, instansi lain, ormas dan unsur masyarakat. Petugas non kloter ini ditempatkan pada titik-titik pelayanan jamaah haji di Arab Saudi baik di Daerah Kerja maupun unit dibawahnya yaitu sektor untuk memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan dan pelayanan ibadah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

*Kedua*, petugas yang menyertai jamaah haji atau disebut petugas kloter TPIHI, TKHI dan TPIH yang direkrut dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Depag, instansi lain, ormas dan unsur masyarakat lainnya.

### **Penelitian Yang Relevan**

Penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Malaysia dengan mendirikan Lembaga Tabung Haji (Lembaga Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji) yang didirikan tahun 1962) dan dimulai sejak tahun 1969 mengakui Tabung Haji sesuai Akta No. 8 Pemerintah Malaysia ternyata dapat meningkatkan perputaran uang. Pada tahun 2003 asset yang dikelola Tabung Haji Malaysia mencapai 10,23 Milyar Ringgit dengan pertumbuhan 10%. Modal yang telah dikumpulkan kemudian dikelola untuk aktivitas ekonomi dan memberi peluang kerja bagi warga Malaysia dalam bidang jasa properti, perkebunan, teknologi serta kegiatan travel. Selain itu juga dapat membantu penyelenggaraan ibadah haji dalam hal pemilihan sewa tempat yang lebih baik, penentuan jenis jasa penerbangan dan kegiatan ekonomi lainnya. (Aaf Susilawati, 2005, h. 16-17). Dengan adanya Tabung Haji dapat menekan biaya perjalanan ibadah haji. Sebagai contoh menurut Tabung Haji Malaysia 2005 biaya perjalanan haji tahun 2004 (8.973 sampai dengan 9.096 RM) lebih murah dari pada biaya pada tahun 2003 (berkisar 9.454 RM).

Lembaga Tabung Haji (*Pilgrims Fund Board*) merupakan salah satu BUMN Malaysia yang didirikan tahun 1969 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi calon haji dengan membantu perhimpunan dana untuk biaya haji secara sedikit-sedikit tanpa melibatkan haji yang haram. Para calon haji dapat mendaftar pada tabungan haji, yakni penabungan dapat dilakukan secara berkala pada "Kaunter Mesra" atau dapat dilakukan dengan "Potongan Gaji" pegawai. Manfaat Tabung Haji terhadap investasi (pendeposit para calon jamaah)

diberikan bonus/keuntungan yang cukup bersaing, mempercepat kepastian serta memberikan keamanan bagi calon jamaah. (Republika, 21 September, 2005).

### **Kerangka Pemikiran**

Kebijakan yang optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji berarti juga memilih alternatif kebijakan mana yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat peserta jamaah haji maupun pihak-pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pelaksanaan ibadah haji. Dengan kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih bebas diserahkan kepada swasta (privatisasi) maka pengaruh kebijakan ini membawa dampak pada perubahan kesejahteraan di sektor-sektor swasta melalui pendapatan usaha yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini beralasan karena sektor usaha akan membawa pengaruh pada jumlah upah yang diterima karyawan, penyerapan tenaga kerja, tunjangan/fasilitas yang diperoleh bagi anggota keluarganya serta kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu perlu mempertimbangkan aspek teori pembangunan regional untuk melihat potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sesuai dengan Teori Basis Ekspor Richardson, serta perlu mengkaji mengenai keunggulan bersaing menurut Porter dengan model "diamond" yang menekankan pada aspek kondisi faktor (memerlukan tenaga kerja sebagai petugas haji, dan tenaga kerja industri terkait), kondisi permintaan (Indonesia memiliki potensi jumlah haji terbesar di dunia), industri yang berhubungan dan industri pendukung maupun menyangkut strategi perusahaan, struktur dan pesaing. Pengembangan model *diamond* juga penting faktor kreasi dan peranan pemerintah dalam keunggulan bersaing. Peranan pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pemerintah (c.q. Departemen Agama) berdasarkan UU.No. 17 Tahun 1999 dan Kepmenag No. 1 Tahun 2001 beserta lembaga terkait serta bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu kegiatan ini pada akhirnya meningkatkan suatu aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan aktivitas ekonomi wilayah DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan perekonomian di Indonesia membawa pengaruh pula terhadap perkembangan ekonomi secara sektoral antara lain industri jasa perbankan, industri biro perjalanan dan industri UMKM. Secara regional

DKI Jakarta sebagai ibukota RI sebagai basis lalu lintas atau perpindahan orang, barang dan jasa akan berinteraksi langsung dan tidak langsung dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan (aktivitas ekonomi) yang memiliki mobilitas tinggi dan pergerakan dinamis yang meliputi komponen-komponen Ongkos Naik Haji (ONH), jumlah haji serta melibatkan sejumlah petugas haji. ONH merupakan biaya yang diperlukan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan haji. Biaya untuk haji khusus (ONH Plus) ditetapkan pemerintah lebih tinggi daripada haji reguler karena terdapat perbedaan fasilitas yang dapat dinikmati oleh jamaah haji.

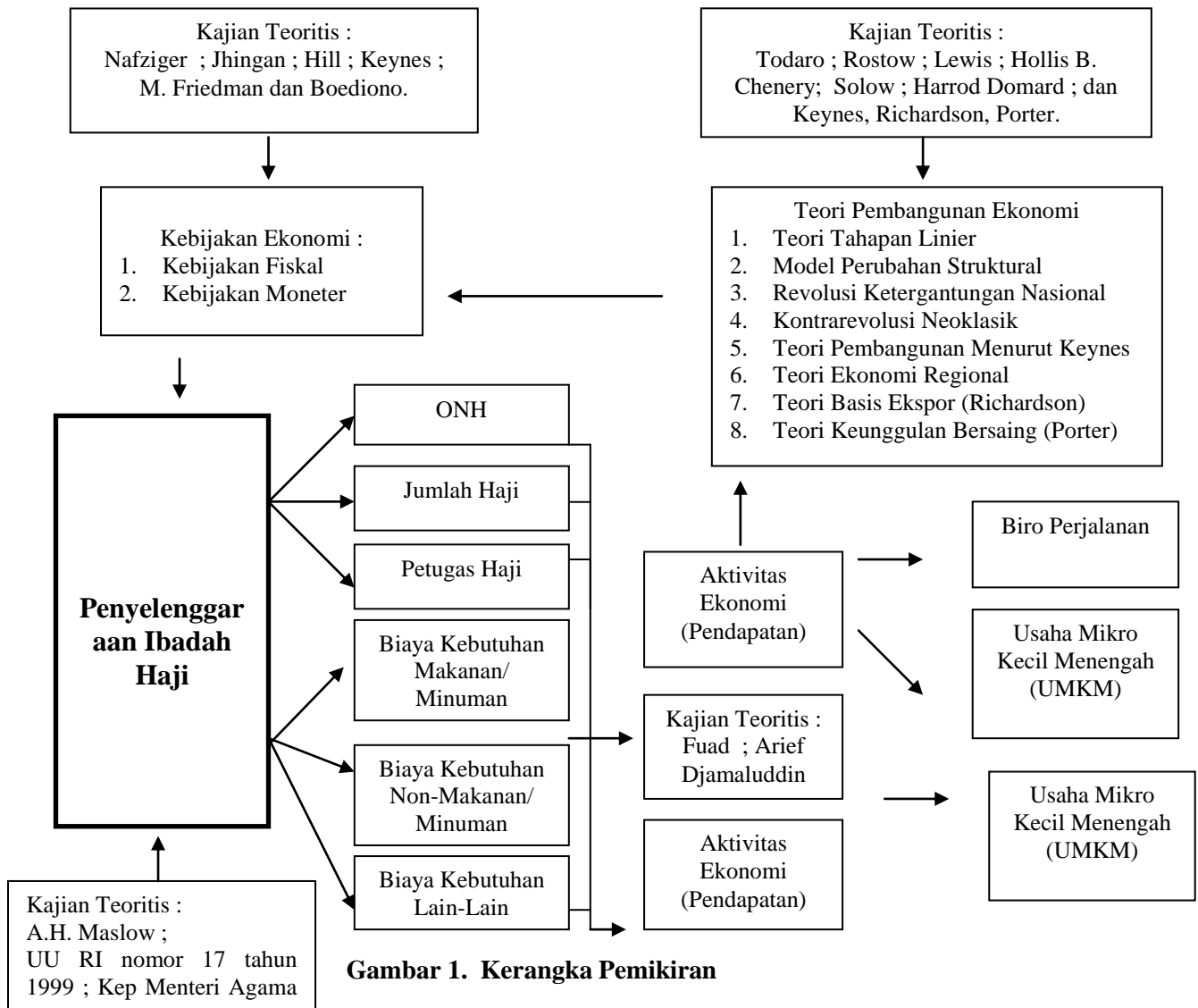
Biaya yang dikeluarkan dalam bentuk ONH disetor secara bertahap (melalui tabung haji) atau secara sekaligus melalui lembaga perbankan (di DKI Jakarta terdapat 10 bank beserta lebih dari seratus kantor cabangnya), lembaga biro perjalanan di DKI (sekitar 1.500 perusahaan) berperan melayani penyediaan angkutan udara, angkutan selama di tanah suci, penginapan, kebutuhan akomodasi di tanah suci hingga pulang kembali ke tanah air. Dengan demikian selain besarnya ONH, besarnya jumlah jamaah haji membawa pengaruh terhadap lalu lintas dana dan aktivitas lembaga perbankan maupun biro perjalanan. Semakin besarnya ONH dan semakin banyak jumlah jamaah haji akan mempengaruhi aktivitas usaha yang dalam hal ini ditunjukkan oleh tingkat pendapatan pada lembaga perbankan dan biro perjalanan. Untuk membantu pelayanan jamaah haji dibantu oleh petugas haji yang tidak selalu sebanding linier dengan banyaknya jamaah haji. Oleh karena itu aktivitas ekonomi sektor perbankan dan biro perjalanan dipengaruhi oleh ONH, Jumlah Haji dan Petugas Haji yang membantu dalam memperlancar penyelenggaraan jamaah haji.

Berkaitan dengan Peugas Haji, perjalanan haji dapat dilaksanakan apabila terdapat organisasi pelaksana haji yang berfungsi sebagai pelaksana agar perjalanan haji dapat berjalan lancar, aman, nyaman, tertib dan sah sesuai tuntunan agama. Pengaturan pelaksanaan haji melibatkan banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bertugas sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Di dalam negeri asal jamaah haji ditangani oleh Departemen Agama dengan melibatkan departemen lain dan unsur masyarakat seperti

Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, lembaga keuangan (Bank milik Pemerintah dan Swasta), perusahaan penerbangan, biro perjalanan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Islam serta unsur masyarakat lainnya. Sedangkan di Arab Saudi, ditangani oleh perwakilan negara asal dengan melibatkan Kementerian Haji Arab Saudi, *Muassasah, Majmuah, Naqabah*, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, Perhubungan dan seluruh unsur pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Karena melibatkan hubungan antar pemerintah (*government to government*) dan demikian banyak pihak serta lembaga yang secara institusional mempunyai

wewenang terhadap pelaksanaan haji maka diperlukan suatu sistem untuk menangani masalah haji, dan dalam kaitan inilah organisasi pelaksana haji memiliki peran penting dalam mengurus, mengelola, menatalaksanakan dan mengatur pelaksanaan haji. Dalam setiap kelompok terbang (kloter) memiliki petugas operasional yang menyertai jamaah haji sejak di asrama haji, di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air untuk membantu para jamaah selama menjalankan tahapan-tahapan haji di Tanah Suci. Petugas haji tersebut adalah para pegawai di lingkungan Departemen Agama (Depag). Untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji dan profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan jumlah maupun kualitas petugas kloter.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Dengan mempertimbangkan kerangka berpikir tersebut di atas maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif ongkos naik haji, jumlah haji, jumlah petugas haji, terhadap peningkatan aktivitas perekonomian di sektor-sektor usaha perbankan, biro perjalanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik secara parsial maupun simultan.
2. Terdapat pengaruh positif biaya kebutuhan makanan/minuman, biaya non makanan, biaya kebutuhan lain, dalam penyelenggaraan haji terhadap aktivitas ekonomi di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah, baik secara parsial maupun simultan.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini memerlukan waktu 30 (tiga puluh) bulan yang dimulai pada Bulan Juni 2006 hingga Bulan Desember 2008. Sedangkan tempat penelitian dilakukan pada bank dan biro perjalanan di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tersambung dengan aktivitas penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu tempat penelitian dilakukan pada jamaah haji dan pemilik UMKM di di sekitar wilayah asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur.

### **Populasi, Sampel dan Sampling**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan penyebaran kuesioner terdiri dari 2 (dua) sasaran. *Pertama* dilakukan pengumpulan data dengan menghubungi langsung para praktisi perbankan dan biro perjalanan. Data primer yang *kedua* dilakukan untuk mengumpulkan data biaya kebutuhan makanan/minuman, biaya kebutuhan non-makanan/minuman dan biaya kebutuhan lain-lain dalam penyelenggaraan haji serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Survei bagi jamaah haji di lingkungan UMKM dilakukan pada tahun 2006 ketika di berada di asrama haji Pondok Gede. Sedangkan data sekunder berbentuk data berkala tahunan (*time series*), mulai periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 digunakan untuk pengumpulan data Ongkos Naik Haji (ONH), Jumlah Haji, Jumlah Petugas Haji dan Aktivitas Ekonomi mengenai data pendapatan Perbankan, Biro Perjalanan Haji dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung keperluan analisis data ini, penulis memerlukan

sejumlah data pendukung, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, Asosiasi-asosiasi Perjalanan Haji, ASITA (*Association of The Indonesia Tour and Travel Agency*) DKI Jakarta, Bank Indonesia, Bank-bank Pelaksana, Badan Pusat Statistik (BPS), dan *browsing* melalui jaringan internet ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id); [www.depag.go.id](http://www.depag.go.id); [www.informasihaji.com](http://www.informasihaji.com); [www.asita.org](http://www.asita.org);) )

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2004, h. 96), *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan responden mudah diajak berkomunikasi dan bersedia meluangkan waktu memberi jawaban di sela-sela mereka bekerja. Berkaitan dengan penentuan sampel penelitian, maka jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin dalam Umar (1999 : h. 108),

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, kemudian metode penelitian berdasarkan pendekatan hubungan antar variabel bersifat sebab-akibat (*causal relationship*) dengan menggunakan model analisis regresi sederhana dan regresi berganda linier. Analisis regresi linier digunakan untuk mengkaji secara langsung pengaruh satu atau sejumlah variabel independen (bebas) terhadap variabel terikat/dependen (Kuncoro, 2003, h. 215). Sedangkan analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menjelaskan kontribusi secara langsung dan tidak langsung variabel *eksogen* (variabel penyebab) terhadap sebuah variabel *endogen* (variabel akibat). Analisa jalur adalah sebuah metode untuk menentukan arah keterhubungan antara sejumlah variabel independen dengan variabel dependen (Mohammad Faisal Amir, 2006, h.290).

### **Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang digunakan terdiri dari beberapa variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi, secara garis besar variabel penyelenggaraan haji terdiri dari ongkos naik haji, jumlah haji, jumlah petugas haji, biaya kebutuhan makanan/minuman, biaya kebutuhan non-makanan/minuman, dan biaya kebutuhan lain-lain. Sedangkan variabel-variabel



dependen atau yang dipengaruhi adalah aktivitas ekonomi, yang terdiri dari pendapatan perbankan, biro perjalanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsional untuk model regresi linier sederhana (antara variabel independen dengan variabel dependen)

maupun model persamaan jalur (antara variabel eksogen dengan variabel endogen).

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1. sebagai berikut :

**Tabel 1. Batasan Operasional Variabel Penelitian Data Sekunder**

Variabel-Variabel	Indikator	Ukuran	Data
(Y <sub>1</sub> )	Pendapatan usaha kotor bank dalam satu tahun.	Juta Rupiah (Rasio)	Sekunder
(Y <sub>2</sub> )	Pendapatan usaha kotor biro perjalanan dalam satu tahun.	Juta Rupiah (Rasio)	Sekunder
(Y <sub>3</sub> )	Pendapatan usaha kotor UMKM dalam satu tahun.	Juta Rupiah (Rasio)	Sekunder
(X <sub>1</sub> )	Biaya penerbangan, biaya operasional dalam negeri langsung dan tidak langsung), biaya administrasi.	Rupiah (Rasio)	Sekunder
(X <sub>2</sub> )	Jumlah orang yang naik haji (regular dan plus).	Orang (Rasio)	Sekunder
(X <sub>3</sub> )	Jumlah TPHI, TKHI, petugas lainnya.	Orang (Rasio)	Sekunder

**Tabel 2. Batasan Operasional Variabel Penelitian Data Primer**

Variabel-Variabel	Indikator	Ukuran	Data
(Y)	Persepsi Pendapatan usaha kotor UMKM dalam satu tahun.	Skala Likert (Ordinal)	Primer
(X <sub>1</sub> )	Persepsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan/minuman.	Skala Likert (Ordinal)	Primer
(X <sub>2</sub> )	Persepsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan non-makanan/minuman.	Skala Likert (Ordinal)	Primer
(X <sub>3</sub> )	Persepsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan lain-lain.	Skala Likert (Ordinal)	Primer

**Tabel 3. Pengertian Variabel-variabel Penelitian**

Variabel-Variabel	Pengertian
Pendapatan Usaha Perbankan (Y <sub>1</sub> )	Total pendapatan usaha bank yang diperoleh dalam setahun.
Pendapatan Usaha Biro Perjalanan Haji (Y <sub>2</sub> )	Total pendapatan usaha Biro Perjalanan yang diperoleh dalam setahun
Pendapatan Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM (Y <sub>3</sub> )	Total pendapatan usaha UMKM yang diperoleh dalam setahun
Ongkos Naik Haji (X <sub>1</sub> )	Biaya yang dikeluarkan/disetor oleh jamaah haji untuk setahun (sekali naik haji)
Jumlah Haji (X <sub>2</sub> )	Banyaknya orang yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji untuk setahun (sekali naik haji)
Jumlah Petugas Haji (X <sub>3</sub> )	Jumlah orang yang melayani para jamaah haji selama

	penyelenggaraan haji.
Pendapatan Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah /UMKM (Y)	Total pendapatan usaha UMKM yang diperoleh dalam setahun
Biaya kebutuhan makanan/minuman ( $X_1$ )	Biaya yang dikeluarkan (diluar ONH) oleh jamaah haji untuk membeli makanan, minuman dan obat-obatan sebelum berangkat perjalanan haji yakni selama berada di karantina asrama haji.
Biaya kebutuhan non-makanan/minuman. ( $X_2$ )	Biaya yang dikeluarkan (diluar ONH) oleh jamaah haji untuk membeli kebutuhan diluar makanan dan minuman (pakaian dan kebutuhan lainnya) sebelum berangkat perjalanan haji yakni selama berada di karantina asrama haji.
Biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ )	Biaya yang dikeluarkan (diluar ONH) oleh jamaah haji untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain sebelum berangkat perjalanan haji yakni selama berada di karantina asrama haji.

### Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

- 1) Observasi (pengamatan) : yaitu melakukan perhatian diiringi pencatatan data secara cermat dan sistematis secara langsung di lokasi obyek penelitian.
- 2) Kuesioner : yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden di sektor Perbankan, Biro Perjalanan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui :

- 1) Laporan-laporan tentang data dan profil jamaah haji melalui laporan kegiatan haji Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Bank Indonesia, Bank Pelaksana, Badang Pusat Statistik, Biro Perjalanan Haji, ASITA DKI Jakarta, Pengusaha UMKM, Siskohat, *internet* dan perusahaan-perusahaan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan haji.
- 2) Studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku teks, catatan kuliah, makalah, bahan-bahan seminar, majalah yang ada hubungannya dengan penelitian dan sebagainya.

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survai, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1987, h. 3). Penelitian survai yang

dimaksud adalah digunakan untuk analisis deskriptif yaitu untuk pengukuran terhadap fenomena sosial dan ekonomi tertentu misalnya menyangkut pendapatan, pekerjaan, kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat dan lainnya. Untuk menunjang analisis dalam menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, penelitian ini juga bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*) yakni dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Regresi Berganda dan Analisis Jalur.

### Metode Analisis

Teknik kuantitatif ; yaitu teknik analisis berdasarkan data kuantitatif dengan menggunakan program statistik, yaitu rumus regresi linier dan korelasi linier sederhana, analisis regresi berganda dan analisa jalur (*path analysis*).

Dalam pengolahan data menggunakan Paket Program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) version 12.00. Untuk pengolahan regresi sederhana koefisien regresi pada hasil *print-out* yang digunakan bersadasrkan *unstandardized coefficient* tetapi untuk menentukan koefisien jalur menggunakan kolom *standardized coefficient*.

Teknik kualitatif; yaitu teknik analisis berdasarkan data kualitatif dengan menggunakan prosedur penggambaran fakta dan karakteristik dari data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data (sumber ; disertasi yang bersangkutan) , maka hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Hipotesis 1

1. Hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) dengan pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah kuat ( $r = 0,814$ ).
2. Pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) terhadap variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah 0,663 ( $R\ Square = 0,663$ ). Ini berarti pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) terhadap pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah 66,3% sedangkan sisanya 33,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,952, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,952 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,952 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) adalah 5,611 ( $Sig. = 0,000$ ). Dengan demikian t hitung variabel ongkos naik haji lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji terhadap variabel pendapatan perbankan adalah signifikan.
5. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_1 = 3.421.183,6 + 2,156 X_1$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) maka variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) hanya mencapai sebesar Rp 3.421.183,6. Setiap peningkatan ongkos naik haji maka akan meningkatkan pendapatan perbankan sebesar Rp. 2,156.
6. Hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) dengan pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah kuat ( $r = 0,808$ ).
7. Pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) terhadap variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah 0,653 ( $R\ Square = 0,653$ ). Ini berarti pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), terhadap pendapatan biro travel ( $Y_2$ ) adalah 65,3% sedangkan sisanya 34,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
8. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,453, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,453 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,453 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
9. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) adalah 5,488 ( $Sig. = 0,000$ ). Dengan demikian t hitung variabel ongkos naik haji lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji adalah signifikan terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ).
10. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_2 = 104.824,46 + 0,02395X_1$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) pendapatan biro perjalanan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 104.824,46. Setiap peningkatan ongkos naik Rp. 1,- maka akan meningkatkan pendapatan biro perjalanan sebesar Rp. 0,02395.
11. Hubungan variabel ongkos naik haji dengan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah cukup kuat ( $r = 0,614$ ).
12. Pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah 0,377 ( $R\ Square = 0,377$ ). Ini berarti pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah 37,7% sedangkan sisanya 62,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
13. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,479, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,479 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,479 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
14. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) adalah 3,115 ( $Sig. = 0,007$ ). Dengan

demikian t hitung variabel ongkos naik haji lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji terhadap adalah signifikan terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ).

15. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_3 = 32.862,157 + 0,003224X_1$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) maka variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah sebesar Rp 32.862,157. Setiap peningkatan ongkos naik haji Rp. 1,- maka akan meningkatkan pendapatan UMKM Rp. 0,003224.

## Hipotesis 2

1. Hubungan variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dengan pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah sangat lemah atau dapat diabaikan ( $r = 0,169$ ).
2. Pengaruh variabel jumlah haji ( $X_2$ ) terhadap variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah 0,028 ( $R\ Square = 0,028$ ). Ini berarti pengaruh variabel jumlah haji ( $X_2$ ) terhadap pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah hanya 2,8% sedangkan sisanya 97,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,262, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,262 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,262 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel jumlah haji ( $X_2$ ) adalah 0,685 ( $Sig. = 0,503$ ). Dengan demikian t hitung variabel jumlah haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel jumlah haji terhadap variabel pendapatan perbankan adalah tidak signifikan.
5. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_1 = 23.800.782 + 250,189 X_2$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel jumlah haji ( $X_2$ ) maka variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) hanya mencapai sebesar Rp 23.800.782. Setiap peningkatan jumlah haji 1 orang maka akan meningkatkan pendapatan perbankan Rp. 250,189.
6. Hubungan variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dengan pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah sangat lemah atau dapat diabaikan ( $r = 0,067$ ).
7. Pengaruh variabel jumlah haji ( $X_2$ ) terhadap variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah 0,005 ( $R\ Square = 0,005$ ). Ini berarti pengaruh variabel jumlah haji ( $X_2$ ) terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah hanya 0,5% sedangkan sisanya 99,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
8. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,287, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,287 < 1,36$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,287 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
9. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel jumlah haji ( $X_2$ ) adalah 0,270 ( $Sig. = 0,790$ ). Dengan demikian t hitung variabel jumlah haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel jumlah haji terhadap variabel pendapatan biro perjalanan adalah tidak signifikan.
10. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_2 = 274.550,27 + 1,119 X_2$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel jumlah haji ( $X_2$ ) maka variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) hanya mencapai sebesar Rp 274.550,27. Setiap peningkatan jumlah haji 1 orang maka akan meningkatkan pendapatan biro perjalanan sebesar Rp. 1,119.
11. Hubungan variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dengan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah lemah ( $r = 0,238$ ).
12. Pengaruh variabel jumlah haji ( $X_2$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah 0,057 ( $R\ Square = 0,057$ ). Ini berarti pengaruh variabel jumlah haji ( $X_2$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah 5,7% sedangkan sisanya 94,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
13. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,376, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,376 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$

- (0,376 < 1,16) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
14. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel jumlah haji ( $X_2$ ) adalah 0,981 (Sig. = 0,341). Dengan demikian t hitung variabel jumlah haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel jumlah haji terhadap variabel pendapatan UMKM adalah tidak signifikan.
  15. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_3 = 47.719,493 + 0,700 X_2$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel jumlah haji ( $X_2$ ) maka variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) hanya mencapai sebesar Rp 47.719,493. Setiap peningkatan jumlah haji 1 orang maka akan meningkatkan pendapatan UMKM sebesar Rp. 0,700.

### Hipotesis 3

1. Hubungan variabel petugas haji ( $X_3$ ) dengan pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah sangat lemah atau dapat diabaikan ( $r = 0,173$ )
2. Pengaruh variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah 0,030 ( $R\ Square = 0,030$ ). Ini berarti pengaruh variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah hanya 3,0% sedangkan sisanya 97,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,285, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,285 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,285 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan otokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel petugas haji ( $X_3$ ) adalah 0,701 (Sig. = 0,493). Dengan demikian t hitung variabel petugas haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel petugas haji terhadap variabel pendapatan perbankan adalah tidak signifikan.
5. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_1 = 25.497.587 + 32.024,319 X_3$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel petugas haji ( $X_3$ ) maka variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) hanya mencapai sebesar Rp 25.497.587. Setiap peningkatan petugas haji 1 orang maka akan meningkatkan pendapatan perbankan sebesar Rp. 32.024,319.
6. Hubungan variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) dapat diketahui dengan angka koefisien korelasi  $r = 0,170$ . Ini berarti hubungan variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah sangat lemah.
7. Pengaruh variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah 0,029 ( $R\ Square = 0,029$ ). Ini berarti pengaruh variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah hanya 2,9% sedangkan sisanya 97,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
8. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,239, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW <$  batas atas ( $dU$ ) ( $0,239 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,239 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
9. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel petugas haji ( $X_3$ ) adalah 0,689 (Sig. = 0,501). Dengan demikian t hitung variabel petugas haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel petugas haji terhadap variabel pendapatan biro perjalanan adalah tidak signifikan
10. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_2 = 232.175,61 + 352,100 X_3$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel petugas haji ( $X_3$ ) maka variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) hanya mencapai sebesar Rp 232.175,61. Setiap peningkatan petugas haji 1 orang maka akan meningkatkan pendapatan biro perjalanan sebesar Rp. 352,100.
11. Hubungan variabel petugas haji ( $X_3$ ) dengan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah lemah ( $r = 0,234$ )
12. Pengaruh variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah

0,055 (*R Square* = 0,055). Ini berarti pengaruh variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah hanya 5,5% sedangkan sisanya 94,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

13. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,395, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,16$  dan  $dU = 1,39$  maka  $DW < \text{batas atas } (dU)$  ( $0,395 < 1,39$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,395 < 1,16$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
14. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k - 1 = 17$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,110. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel petugas haji ( $X_3$ ) adalah 0,964 (*Sig.* = 0,349). Dengan demikian t hitung variabel petugas haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel petugas haji terhadap variabel pendapatan UMKM adalah tidak signifikan.
15. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :  $Y_3 = 43.557,783 + 86,085X_3$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel petugas haji ( $X_3$ ) maka variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) hanya mencapai sebesar Rp 43.557,783. Setiap peningkatan 1 orang petugas haji maka akan meningkatkan pendapatan UMKM sebesar Rp. 86,085

#### Hipotesis 4

1. Hubungan variabel ongkos naik haji dengan pendapatan perbankan adalah  $r = 0,814$ , berarti hubungan kedua variabel kuat dan positif. Hubungan variabel jumlah haji dengan pendapatan perbankan adalah  $r = -0,169$ , berarti hubungan kedua variabel dan sangat lemah atau dapat diabaikan.
2. Hubungan variabel petugas haji dengan pendapatan perbankan adalah  $r = -0,173$ , berarti hubungan kedua variabel negatif dan sangat lemah atau dapat diabaikan.
3. Hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) dengan pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) dapat diketahui dengan angka koefisien korelasi  $R = 0,900$ . Ini berarti hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) secara bersama-sama dengan pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah sangat kuat.

4. Pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah 0,809 (*R Square* = 0,809). Ini berarti pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), jumlah haji ( $X_2$ ) dan petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) adalah 80,9% sedangkan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
5. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 1,478, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 3 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 0,93$  dan  $dU = 1,69$  maka  $DW < \text{batas atas } (dU)$  ( $1,478 < 1,69$ ) atau  $DW > dL$  ( $1,478 > 0,93$ ) sehingga dapat diasumsikan tidak dapat diketahui terjadi otokorelasi atau tidak.
6. Hasil uji F terhadap koefisien korelasi F hitung = 19,817 (*Sig.* = 0,000). F tabel untuk  $n = 18$  maka derajat kebebasan pembilang  $3 = k - 1 = 4 - 1$  dan penyebut  $n - k = 18 - 4 = 14$  pada derajat kepercayaan 95% (uji dua arah) diperoleh F tabel 3,34 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ( $19,817 > 3,34$ ). Ini berarti variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perbankan ( $Y_1$ ).
7. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 4 = 14$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,145. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) adalah 7,559 (*Sig.* = 0,000), koefisien regresi untuk variabel jumlah haji ( $X_2$ ) adalah 3,156 (*Sig.* = 0,007), koefisien regresi untuk variabel petugas haji ( $X_3$ ) adalah 3,194 (*Sig.* = 0,006). Dengan demikian t hitung variabel ongkos naik haji, variabel calon haji dan variabel petugas haji lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji, variabel jumlah haji dan variabel petugas haji terhadap variabel pendapatan perbankan adalah signifikan.
8. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi berganda linier sebagai berikut :  $Y_1 = 6.348.858,7 + 2,637 X_1 + 1.192,484 X_2 + 144.080,5 X_3$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) maka variabel pendapatan perbankan ( $Y_1$ ) hanya mencapai sebesar Rp 6.348.858,7 juta. Jika setiap kenaikan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ )

- sebesar Rp 1,- tanpa adanya kenaikan jumlah jumlah haji ( $X_2$ ) dan petugas haji ( $X_3$ ) akan meningkatkan pendapatan perbankan sebesar Rp 2,637. Dengan penambahan 1 orang jumlah haji ( $X_2$ ) tanpa adanya kenaikan ongkos naik haji ( $X_1$ ) dan petugas haji ( $X_3$ ) akan meningkatkan pendapatan perbankan sebesar Rp 1.192,484 dan jika setiap penurunan 1 orang jumlah petugas haji ( $X_3$ ) tanpa peningkatan ongkos naik haji ( $X_1$ ) dan jumlah haji ( $X_2$ ) maka akan meningkatkan pendapatan perbankan sebesar Rp 144.080,5.
9. Hubungan variabel ongkos naik haji dengan pendapatan perjalanan adalah  $r = 0,808$ , berarti hubungan kedua variabel kuat. Hubungan variabel jumlah haji dengan pendapatan biro perjalanan adalah  $r = 0,067$ , berarti hubungan kedua variabel sangat lemah. Hubungan variabel petugas haji dengan pendapatan biro perjalanan adalah  $r = 0,170$ , berarti pengaruh kedua variabel sangat lemah.
  10. Hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) dengan pendapatan biro perjalanan dapat diketahui dengan angka koefisien korelasi  $R = 0,881$ . Ini berarti hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) secara bersama-sama dengan pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah kuat.
  11. Pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah 0,776 ( $R^2 = 0,776$ ). Ini berarti pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), jumlah haji ( $X_2$ ) dan petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) adalah 77,6% sedangkan sisanya 22,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
  12. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 0,739, sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 3 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha 0,05$  yaitu  $dL = 0,93$  dan  $dU = 1,69$  maka  $DW < batas\ atas\ (dU)$  ( $0,739 < 1,69$ ) atau  $DW < dL$  ( $0,739 < 0,93$ ) sehingga dapat diasumsikan ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
  13. Hasil uji F terhadap koefisien korelasi F hitung = 16,130 (Sig. = 0,000). F tabel untuk  $n = 18$  maka derajat kebebasan pembilang 3 =  $k - 1 = 4 - 1$  dan penyebut  $n - k = 18 - 4 = 14$  pada derajat kepercayaan 95% (uji dua arah) diperoleh F tabel 3,34 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ( $16,130 > 3,34$ ). Ini berarti variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ).
  14. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 4 = 14$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,145. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) adalah 6,721 (Sig. = 0,000), koefisien regresi untuk variabel jumlah haji ( $X_2$ ) adalah 2,016 (Sig. = 0,063), koefisien regresi untuk variabel petugas haji ( $X_3$ ) adalah 0,856 (Sig. = 0,406). Dengan demikian t hitung variabel ongkos naik haji lebih besar dari t Tabel. Sedangkan variabel jumlah haji dan petugas haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji adalah signifikan terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ). Sedangkan variabel jumlah haji dan petugas haji adalah tidak signifikan terhadap pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ).
  15. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi berganda linier sebagai berikut :  $Y_2 = 13.387,871 + 0,02847X_1 + 9,250 X_2 + 469,158X_3$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) maka variabel pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 13.387,871 juta. Jika setiap kenaikan ongkos naik haji ( $X_1$ ) sebesar Rp 1 sedangkan variabel yang lain tetap akan meningkatkan pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) sebesar Rp 0,02847. Dengan penambahan jumlah haji ( $X_2$ ) sebanyak 1 orang sedangkan variabel yang lain tetap akan meningkatkan pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) sebesar Rp 9,250 dan jika setiap kenaikan jumlah petugas haji ( $X_3$ ) sebanyak 1 orang sedangkan variabel yang lain tetap maka akan meningkatkan pendapatan biro perjalanan ( $Y_2$ ) sebesar Rp 469,158.
  16. Hubungan variabel ongkos naik haji dengan pendapatan UMKM adalah  $r = 0,614$ , berarti hubungan kedua variabel cukup kuat. Hubungan variabel jumlah haji dengan pendapatan UMKM adalah  $r = 0,238$ , berarti hubungan kedua variabel lemah. Hubungan variabel petugas haji dengan pendapatan UMKM adalah  $r = 0,234$ , berarti hubungan kedua variabel lemah.

17. Hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) dengan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) dapat diketahui dengan angka koefisien korelasi  $R = 0,793$ . Ini berarti hubungan variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) secara bersama-sama dengan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah kuat.
18. Pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah  $0,628$  ( $R\ Square = 0,628$ ). Ini berarti pengaruh variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), jumlah haji ( $X_2$ ) dan petugas haji ( $X_3$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah  $62,8\%$  sedangkan sisanya  $37,2\%$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
19. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu  $0,958$ , sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 18 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 3 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha 0,05$  yaitu  $dL = 0,93$  dan  $dU = 1,69$  maka  $DW < dL$  ( $0,958 < 0,93$ ) atau  $DW > dU$  ( $0,958 > 1,69$ ) sehingga dapat diasumsikan tidak dapat diketahui terjadi otokorelasi atau tidak.
20. Hasil uji F terhadap koefisien korelasi F hitung =  $7,892$  (Sig. =  $0,003$ ). F tabel untuk  $n = 18$  maka derajat kebebasan pembilang  $3 = k - 1 = 4 - 1$  dan penyebut  $n - k = 18 - 4 = 14$  pada derajat kepercayaan  $95\%$  (uji dua arah) diperoleh F tabel  $3,34$  sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ( $7,892 > 3,34$ ). Ini berarti variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel calon haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ).
21. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 18 - 4 = 14$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan  $95\%$  diperoleh  $2,145$ . Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ) adalah  $4,627$  (Sig. =  $0,000$ ), koefisien regresi untuk variabel jumlah haji ( $X_2$ ) adalah  $2,516$  (Sig. =  $0,025$ ), koefisien regresi untuk variabel petugas haji ( $X_3$ ) adalah  $1,355$  (Sig. =  $0,197$ ). Dengan demikian t hitung variabel ongkos naik haji, variabel jumlah haji lebih besar dari t Tabel. Sedangkan untuk variabel petugas haji lebih kecil dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel ongkos naik haji, variabel jumlah haji adalah signifikan terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ). Sedangkan koefisien regresi untuk variabel petugas haji adalah tidak signifikan.
22. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi berganda linier sebagai berikut :  $Y_3 = 13.154,511 + 0,004466X_1 + 2,630X_2 + 169,150X_3$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel ongkos naik haji ( $X_1$ ), variabel jumlah haji ( $X_2$ ) dan variabel petugas haji ( $X_3$ ) maka variabel pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah sebesar Rp  $13.154,511$  juta. Jika setiap kenaikan ongkos naik haji ( $X_1$ ) sebesar Rp  $1$  sedangkan variabel yang lain tetap akan meningkatkan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) sebesar Rp  $0,004466$ . Dengan penambahan jumlah haji ( $X_2$ ) sebanyak  $1$  orang tanpa adanya kenaikan ongkos naik haji ( $X_1$ ) dan petugas haji ( $X_3$ ) akan meningkatkan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) sebesar Rp  $2,630$  dan jika setiap kenaikan jumlah petugas haji ( $X_3$ ) sebanyak  $1$  orang tanpa peningkatan ongkos naik haji ( $X_1$ ) dan jumlah haji ( $X_2$ ) maka akan meningkatkan pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) sebesar Rp  $169,150$ .

### Hipotesis 5

1. Hubungan variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ) dengan pendapatan UMKM ( $Y$ ) adalah cukup kuat dan positif ( $r = 0,516$ )
2. Pengaruh variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM ( $Y$ ) adalah  $0,266$  ( $R\ Square = 0,266$ ). Ini berarti pengaruh variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y$ ) adalah  $26,6\%$  sedangkan sisanya  $73,4\%$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu  $2,347$  sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 50 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha 0,05$  yaitu  $dL = 1,08$  dan  $dU = 1,36$  maka  $DW > dL$  ( $2,347 > 1,08$ ) atau  $DW > dU$  ( $2,347 > 1,36$ ) sehingga dapat diasumsikan tidak ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 50 - 2 = 48$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan  $95\%$  diperoleh  $2,021$ . Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan



makanan dan minuman ( $X_1$ ) adalah 4,176 (Sig. = 0,000). Dengan demikian t hitung variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman terhadap adalah signifikan terhadap pendapatan UMKM (Y).

5. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi berganda linier sebagai berikut :  $Y = 2,176 + 0,425 X_1$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ) maka pendapatan UMKM hanya mencapai Rp 2,176. Setiap peningkatan biaya kebutuhan makanan dan minuman Rp. 1,- maka akan meningkatkan pendapatan UMKM sebesar Rp. 0,425.

#### Hipotesis 6

1. Hubungan variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_1$ ) dengan pendapatan UMKM (Y) adalah cukup kuat dan positif ( $r = 0,573$ ).
2. Pengaruh variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_1$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM (Y) adalah 0,329 ( $R^2 = 0,329$ ). Ini berarti pengaruh variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_1$ ) terhadap pendapatan UMKM (Y) adalah 32,9% sedangkan sisanya 67,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 1,971 sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 50 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,08$  dan  $dU = 1,36$  maka  $DW >$  batas atas ( $dU$ ) ( $1,971 > 1,08$ ) atau  $DW > dL$  ( $1,971 > 1,36$ ) sehingga dapat diasumsikan tidak ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 50 - 2 = 48$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,021. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ) adalah 4,85 (Sig. = 4,850). Dengan demikian t hitung variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman terhadap adalah signifikan terhadap pendapatan UMKM (Y).

5. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi berganda linier sebagai berikut :  $Y = 2,083 + 0,443 X_1$ . Ini berarti bahwa tanpa variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_1$ ) maka pendapatan UMKM hanya mencapai sebesar Rp 2,083. Setiap peningkatan biaya kebutuhan non makanan dan minuman sebesar Rp. 1,- maka akan meningkatkan pendapatan UMKM sebesar Rp. 0,443.

#### Hipotesis 7

1. Hubungan variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_1$ ) dengan pendapatan UMKM (Y) adalah kuat dan positif ( $r = 0,642$ ).
2. Pengaruh variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_1$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM (Y) adalah 0,413 ( $R^2 = 0,413$ ). Ini berarti pengaruh variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_1$ ) terhadap pendapatan UMKM (Y) adalah 41,3% sedangkan sisanya 58,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 1,799 sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 50 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 1 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha$  0,05 yaitu  $dL = 1,08$  dan  $dU = 1,36$  maka  $DW >$  batas atas ( $dU$ ) ( $1,799 > 1,08$ ) atau  $DW > dL$  ( $1,799 > 1,36$ ) sehingga dapat diasumsikan tidak ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 50 - 2 = 48$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,021. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ ) adalah 5,921 (Sig. = 0,000). Dengan demikian t hitung variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan lain-lain terhadap adalah signifikan terhadap pendapatan UMKM (Y).
5. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi berganda linier sebagai berikut :  $Y = 2,083 + 0,443 X_1$  Ini berarti bahwa tanpa variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_1$ ) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 2,083. Setiap peningkatan biaya kebutuhan lain-lain Rp. 1,- maka akan meningkatkan pendapatan UMKM sebesar Rp. 0,443.

#### Hipotesis 8

1. Hubungan variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman dengan pendapatan UMKM adalah  $r = 0,516$ , berarti hubungan kedua variabel cukup kuat dan positif. Hubungan variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman dengan pendapatan UMKM adalah  $r = 0,573$ , berarti hubungan kedua variabel cukup kuat. Hubungan variabel biaya kebutuhan lain-lain dengan pendapatan UMKM adalah  $r = 0,642$ , berarti hubungan kedua variabel kuat.
2. Hubungan variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ), variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_2$ ) dan variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y$ ) dapat diketahui dengan angka koefisien korelasi  $R = 0,737$ . Ini berarti hubungan variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ), variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_2$ ) dan variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ ) terhadap pendapatan UMKM ( $Y$ ) adalah kuat.
3. Pengaruh variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ), variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_2$ ) dan variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ ) terhadap variabel pendapatan UMKM ( $Y$ ) adalah 54,2% ( $R^2 = 0,542$ ). Sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
4. Nilai Durbin-Watson diperoleh angka yaitu 2,075 sedangkan jumlah observasi ( $n$ ) = 50 dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 3 sehingga diperoleh DW tabel pada  $\alpha 0,05$  yaitu  $dL = 1,42$  dan  $dU = 1,67$  maka  $DW > dU$  ( $2,075 > 1,67$ ) atau  $DW > dL$  ( $2,075 > 1,42$ ) sehingga dapat diasumsikan tidak ada otokorelasi baik positif maupun negatif.
5. Hasil uji F terhadap koefisien korelasi F hitung = 18,178 (Sig. = 0,000). F tabel untuk  $n = 50$  maka derajat kebebasan pembilang 3 =  $k - 1 = 4 - 1$  dan penyebut  $n - k = 50 - 4 = 46$  pada derajat kepercayaan 95% (uji dua arah) diperoleh F tabel 2,84 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ( $18,178 > 2,84$ ). Ini berarti variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ), variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_2$ ) dan variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ ) berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ).
6. Hasil uji t terhadap koefisien regresi derajat kebebasan  $n - k = 50 - 4 = 46$ , maka t Tabel pada derajat kepercayaan 95% diperoleh 2,021. Sedangkan t hitung untuk koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman ( $X_1$ ) adalah 2,036 (Sig. = 0,048), koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman ( $X_2$ ) adalah 2,206 (Sig. = 0,032), koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan lain-lain ( $X_3$ ) adalah 3,583 (Sig. = 0,001). Dengan demikian t hitung variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman, variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman dan variabel biaya kebutuhan lain-lain lebih besar dari t Tabel. Maka koefisien regresi untuk variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman, variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman dan variabel biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM ( $Y$ ).
7. Persamaan jalur dalam model 8 adalah sebagai berikut :  $Y = 0,233 X_1 + 0,265 X_2 + 0,421 X_3 + 0,677$ . Variabel yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM adalah variabel biaya kebutuhan lain-lain (koefisien jalur = 0,421), variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman (koefisien jalur = 0,265) dan variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman (koefisien jalur = 0,233).
8. Aktivitas penyelenggaraan haji yang berpengaruh terhadap pendapatan perbankan, biro perjalanan dan UMKM adalah belanja haji ONH dalam negeri (tidak termasuk biaya selama kegiatan di Saudi Arabia sedang belanja operasional selama di luar negeri Saudi Arabia merupakan bentuk kebocoran dana dari dalam negeri).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan perbankan adalah cukup kuat. Pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah cukup kuat. Pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

Pengaruh jumlah haji terhadap pendapatan perbankan adalah sangat lemah. Pengaruh jumlah haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah sangat lemah. Pengaruh jumlah haji terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah sangat lemah.

Pengaruh petugas haji terhadap pendapatan perbankan adalah sangat lemah. Pengaruh petugas haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah sangat lemah. Pengaruh petugas haji terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah sangat lemah.

Pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji dan petugas haji terhadap pendapatan perbankan secara bersama-sama adalah sangat kuat. Pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji dan petugas haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah kuat. Pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji dan petugas haji terhadap pendapatan UMKM ( $Y_3$ ) adalah kuat.

Pengaruh biaya kebutuhan makanan dan minuman terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

Pengaruh biaya kebutuhan non makanan dan minuman terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

Pengaruh biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM adalah sedang.

Pengaruh biaya kebutuhan makanan dan minuman, biaya kebutuhan non makanan dan minuman dan biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM secara bersama-sama adalah cukup kuat.

Variabel yang dominan mempengaruhi pendapatan UMKM adalah biaya kebutuhan lain-lain. Sumbangan efektif yang dihasilkan dari biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM adalah sebesar 27% dimana melalui pengaruh langsung sebesar 18% dan pengaruh tidak langsung sebesar 9%.

### Saran

Ongkos Naik Haji, jumlah haji dan jumlah petugas haji secara bersama-sama berpengaruh cukup besar terhadap aktivitas ekonomi di sektor perbankan, biro perjalanan maupun UMKM. Namun apabila ditinjau secara parsial variabel yang paling menonjol adalah Ongkos Naik Haji. Ini beralasan karena sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan ONH secara terus menerus. Sedangkan jumlah jamaah haji di DKI Jakarta sejak tahun 2004 mengalami penurunan yang berarti hampir sama dengan tahun 1991 (kecuali

tahun 1998). Pengurangan jumlah haji di DKI Jakarta karena kenaikan ONH, oleh karena itu untuk menaikkan jumlah haji DKI Jakarta perlu meninjau kembali besarnya ONH yang lebih terjangkau atau meninjau kembali sistem pembayaran ONH misalnya melalui tabungan haji.

Pengaruh variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman, biaya non makanan dan minuman serta biaya kebutuhan lain-lain cukup besar terhadap pendapatan UMKM. Oleh karena itu penyelenggara haji dapat memanfaatkan unit-unit usaha di sekitar jamaah haji yang berada di karantina atau asrama haji di DKI Jakarta sehingga UMKM dapat memanfaatkan usahanya yang lebih optimal sebagai bagian peningkatan aktivitas UMKM.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji di masa yang akan datang perlu dikembangkan sistem pembayaran haji dengan menerapkan tabung haji yang dikelola secara mandiri terlepas dari lembaga perbankan yang ada saat ini sehingga dana tabung haji dapat dimanfaatkan lebih optimal bagi lembaga yang bersangkutan maupun keringanan ongkos naik haji.

Diperlukan satu wadah sebagai pusat informasi haji yang lebih terinci, transparan dan *up-to-date* agar masyarakat ataupun berbagai pihak yang ingin mengetahui proses penyelenggaraan haji dapat lebih mempercayai penyelenggara haji yang efisien dan bermanfaat bagi kesejahteraan ummat.

### DAFTAR PUSTAKA

- AL RASYID, HARUN. 1994. *Statistika sosial*. Disunting oleh Teguh Kismantoroadji. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- ARSYAD LINCOLIN, 1999. *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Negara Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- ASITA, 2006. *Association of the indonesia tour and travel agency*. Jakarta : DPD ASITA DKI Jakarta. [www.asita.org](http://www.asita.org).
- BADAN PUSAT STATISTIK, 1992-1998. *Indikator kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : BPS Pusat Jakarta.
- BADAN PUSAT STATISTIK, 2003. *Jakarta dalam angka 2002*. Jakarta : BPS Propinsi DKI Jakarta.

- BADAN PUSAT STATISTIK, 2003. *Indikator industri kecil dan kerajinan rumahtangga 1996-2001*. Jakarta : BPS Propinsi DKI Jakarta.
- BADAN PUSAT STATISTIK, 2000-2007. *Jakarta Timur dalam angka* . Jakarta : BPS Propinsi DKI Jakarta.
- BANK INDONESIA, 1990-2004. *Direktori Perbankan Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia.
- BOEDIONO, 1994. *Ekonomi mikro*. Yogyakarta : BPFE
- BOEDIONO, 2005. *Ekonomi makro*. Edisi 4. Yogyakarta : BPFE.
- CASE AND FAIR, 2004. *Prinsip-prinsip ekonomi makro*. Jakarta : Kelompok Gramedia.
- CHAPRA M. UMER, 2000. *Islam dan tantangan ekonomi*. Jakarta : Penerbit Andalan.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I., 2004. *Penyelenggaraan ibadah haji 1425 H/ 2005 M*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I., 2004. *Penyelenggaraan ibadah haji 1425 H/ 2005 M*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I. 2004. *Realitas dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji. Bunga Rampai Perhajian*. Cetakan II. Jakarta :Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I. 2004. *Sistem pendaftaran haji*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I , 2004. *Data dan profil jamaah haji Indonesia tahun 2000 s.d. 2004*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I. , 2002. *Data dan profil jamaah haji Indonesia tahun 1996 s.d. 2002*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I. , 2001. *Data dan profil jamaah haji Indonesia tahun 1997 s.d. 2001*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPARTEMEN AGAMA R.I., 1981. *Agama dalam pembangunan nasional (himpunan sambutan presiden soeharto)*. Jakarta : Pustaka Biru.
- DINAS PARIWISATA DKI JAKARTA, 2005. *Jakarta travel directory*. Jakarta : Jakarta. City Government Tourism Office.
- DIREKTORAT JENDERAL URUSAN HAJI, 1978. *Laporan penyelenggaraan urusan haji dari tahun 1965 s/d 1978*. Jakarta.
- DJAMALUDDIN, A.ARIEF, 2000. *Penggunaan model-model pembangunan dalam perencanaan ekonomi regional*. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- DJAMALUDDIN, A.ARIEF, 2002. *Ekonomi pembangunan*. Jakarta.
- DITJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI, 1983. *Laporan penyelenggaraan urusan haji tahun 1979- 1983*. Jakarta.
- DITJEN BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI, 2004. *Keputusan Direktur Jenderal bimbingan islam dan penyelenggaraan haji. Nomor : D/163/Tahun 2004. tentang sistem pendaftaran haji*. 27 April 2004, Jakarta.
- FROYEN, RICHARD T AND LINDA LOW. 2001. *Macroeconomics (An Asian perspective)*. Singapore. Prentice Hall Pearson Education. Asia Pte. Ltd.
- HAKIM, A., 2002. *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta : Ekonisia.
- HARAHAP DAN MURSIDI, 1994. *Lintasan sejarah perjalanan jamaah haji Indonesia*. Jakarta : Inti Media.
- HILL, HAL, 2002. *Ekonomi Indonesia*. Edisi Kedua. Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo. Edisi Kedua. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- JHINGAN, 2000. *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, 2007. *Laporan akhir. evaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan usaha dalam rancangan perubahan undang-undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji*. Jakarta.
- KUNCORO, M. 2000. *Metode kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.
- KUNCORO, M. 2002, *Ekonomi pembangunan, teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP UKPN.
- KUNCORO, M. 2003. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis tesis*. Jakarta : Erlangga.

- LEMBAGA STUDI AGAMA & SOSIAL DAN PT. KOTONI PESISIR SULAWESI, 2004. *Petunjuk perjalanan haji & umrah*, Jakarta : PT. Kotoni Pesisir Sulawesi.
- MASNGUDI DAN MEIRINALDI. 1996. *Kewirausahaan* (diktat kuliah). Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- NAFZIGER E.W., 1997. *The Economic of developing countries*. Third Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey.
- NIDJAM DAN HANAN, 2001. *Manajemen haji studi kasus dan telaah implementasi knowledge workers*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- PORTER. E. MICHAEL. 1990. *The Competitive advantage of nations*. The London and Basingstoke : Macmillan Press Ltd.
- RIDUWAN, 2007. *Cara menggunakan dan memakai analisis jalur (path analysis)*. Bandung : Alfabeta.
- ROSIAD, MOCH. ABD. H., 2004. *Penyusunan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) Tahun 2005*. Jakarta : Bulletin Al-Mabrur Nomor 04/Agustus/2004 M/1425 H.
- ROSTOW, W.W. 1960. *The Stage of economic growth : A Non Communism Manifesto*. London : Cambridge University Press.
- SALEH HASSAN E., 2000. *Studi Islam di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan Wawasan*,. Cetakan Kedua (Revisi). ISTN. Jakarta, 2000.
- SINGARIMBUN, M. DAN SOFIAN EFFENDI (Editor), 1989. *Metode penelitian survai*. Edisi Revisi. Jakarta : LP3ES.
- SUGIYONO, 2002. *Metode penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Metode penelitian administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- SUKIRNO S., 1999. *Pengantar teori makroekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Ekonomi pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- SURYANA, 2000. *Ekonomi pembangunan, problematika dan pendekatan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- SUSILAWATI, AFAF, 2005. *Mengenal lebih dekat layanan tabung haji Malaysia*. Jakarta : Ikhlas Nomor 40 Tahun VIII Desember 2005.
- TARIGAN, ROBINSON. 2006. *Ekonomi regional (teori dan aplikasi)*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perencanaan pembangunan wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- TODARO., M. 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Penerjemah : Haris Munandar. Jakarta : Erlangga.
- UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR : 17 TAHUN 1999. *Tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Undang-Undang RI. Nomor : 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat 1999*, Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi.
- WAHANA KOMPUTER, 2005. *Pengembangan analisis multivariate SPSS 12*. Jakarta : Salemba Empat.
- WIJANTO, SETYO HARI, 2008. *Structural equation modelling dengan lisrel 8.8*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- WIRASASMITA, YUYUN. 1999. *Kewirausahaan dan wirausaha*. Bandung. IKIP.
- WINARDI, 2002. *Motivasi dan pemotivasi dalam manajemen*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Media Massa dan Internet/Blog :**  
<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm> Semarak di asrama haji. Sabtu, 27 Desember 2003.  
<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm> Kisruh penyeleng-garaan haji. Hery Sucipto. Sabtu, 27 Desember 2003.  
<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm> Saatnya privatisasi urusan haji. Sabtu, 27 Desember 2003.  
<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm> Monopoli haji dan buruknya pelayanan. Sabtu, 27 Desember 2003.  
<http://www.informasihaji.com>. DEPARTEMEN AGAMA R.I., 2004. *Pedoman teknis pendaftaran haji tahun 2005 M/1425 H*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.  
<http://www.pikiran-rakyat.com>. KBIH khusus sambut baik pembebasan kuota haji. jangan sebatas Wacana. 6 Desember 2004.